



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PERANGKAT DAERAH KOTA JAMBI



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA JAMBI TAHUN 2025

**KATA PENGANTAR**

Laporan Kinerja Dinas PPKB Kota Jambi merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas PPKB Kota Jambi dalam mencapai sasaran strategis. Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Laporan kinerja Dinas PPKB Kota Jambi Tahun 2025 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2025 yang melibatkan seluruh unsur Dinas PPKB Kota Jambi. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja.

Dari hasil pengukuran kinerja pada tahun 2025, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 1 (satu) sasaran dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja yg ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan partisipasinya terhadap berbagai kegiatan Dinas PPKB Kota Jambi didalam mencapai sasaran serta indikator kegiatan kami ucapkan terimakasih.

Jambi, Januari 2026

Kepala Dinas PPKB Kota Jambi

MISMAN, S.K.M, M.K.M

Pembina Tingkat I

NIP. 197201021998031005



DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Struktur Organisasi
- 1.2. Tugas Fungsi
- 1.3. Isu Isu Strategis
- 1.4. Kepegawaian
- 1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana
- 1.6. Keuangan
- 1.7. Sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1. Perencanaan Strategis
- 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 2.3. Rencana Anggaran Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah
- 3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2025

BAB IV PENUTUP.

KESIMPULAN

RENCANA TINDAKLANJUT

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Komposisi Pegaawai pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi
Tabel 1.2	Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per 31 Desember 2025
Tabel 2.2.	Sasaran Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi Tahun 2025– 2029
Tabel 2.3	Sasaran, Program dan Kegiatan
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Tabel 2.5.	Target Belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambia APBD Perubahan Tahun 2025
Tabel 2.6	Anggaran Belanja per Sasaran Strategis
Tabel 2.7	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja berikut
Tabel 3.1.	Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Tahun 2025
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja Program Tahun 2025
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan 2025
Tabel 3.5.	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Target Renstra PerubahanTahun 2025 - 2029
Tabel 3.6.	Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi
Tabel 3.7	Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2025



DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi
2. Diagram Perkembangan Capaian Kinerja Indikator Sasaran dibanding target
3. Dokumentasi Prestasi dan Inovasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi



BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Jambi Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini disusun, menyajikan capaian kinerja dari Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Jambi berdasarkan dengan RPJMD tahun 2025-2029 dan rencana kinerja tahun 2025 yang telah dibuat sebelumnya. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Jambi Tahun 2025 yang diharapkan dapat:

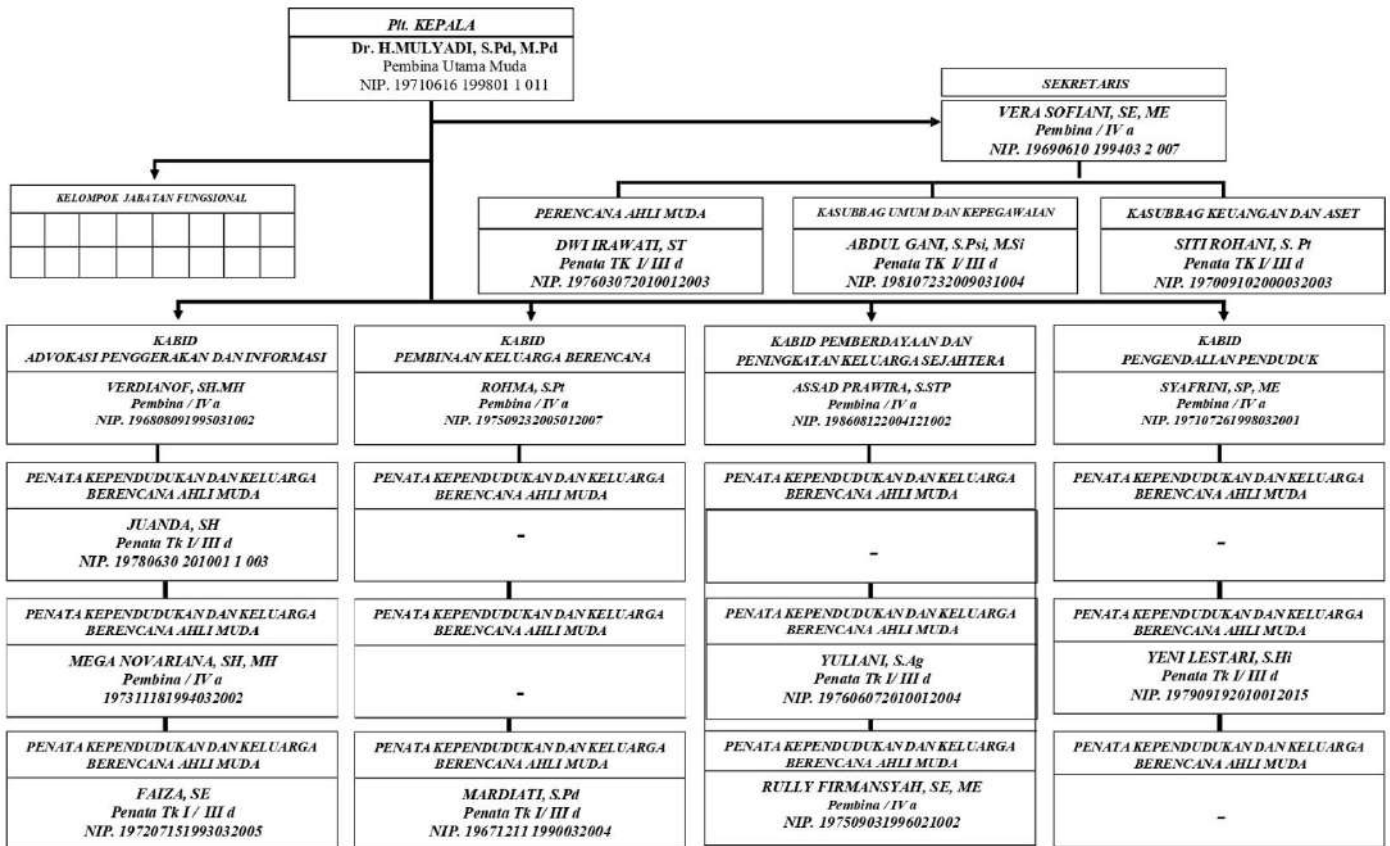
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Jambi;
2. Mendorong Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Jambi didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Jambi untuk meningkatkan kinerjanya
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

1.1 Struktur Organisasi

Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA JAMBI TAHUN 2025



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

1.2 Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Jambi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas PPKB Kota Jambi mempunyai fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
2. Pelaksanaan norma standar, prosedur dan kriteria di Bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
3. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
4. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
5. Pelaksanaan advokasi, komunikasi informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;



6. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB;
7. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
8. Pelaksanaan pelayanan KB;
9. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
10. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
11. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Jambi dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretaris dan Kabid, Kasubbag, serta Kelompok Jabatan Fungsional



1.3 Isu-Isu Strategis

Isu Strategis merupakan suatu pokok permasalahan yang sedang hangat dibicarakan atau sedang dalam proses dan akan terjadi. Permasalahan mendesak terkait urusan yang ditangani oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Jambi. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Jambi, antara lain sebagai berikut:

Urusan Pengendalian Penduduk

- a. Penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek tetapi juga subyek pembangunan. Paradigma penduduk sebagai obyek telah mengeliminir partisipasi penduduk dalam pembangunan
- b. Penduduk memiliki peran sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan upaya pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan
- a. Partisipasi masyarakat juga belum maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan.
- b. Masih rendahnya partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, politik dan hukum

Urusan Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

- a. Proyeksi jumlah penduduk Kota Jambi setiap tahunnya mengalami peningkatan
- b. Terbatasnya petugas lapangan dalam melaksanakan pembinaan program KB dibandingkan dengan cakupan pembinaan kelestarian ber KB.
- c. Pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi perempuan dan remaja masih rendah.
- d. Pusat atau lembaga advokasi dan konseling hak-hak dan kesehatan reproduksi bagi remaja yang ada saat ini masih sangat terbatas jangkauannya dan belum dapat memenuhi kebutuhan remaja.
- e. Pendidikan kesehatan reproduksi remaja melalui jalur sekolah juga belum sepenuhnya berhasil.
- c. Masih Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta KB aktif.
- d. Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi pria dalam ber-KB
- e. Masih rendahnya pasangan usia subur yang menjadi akseptor KB
- f. Belum optimalnya fasilitas pelayanan kesehatan primer dapat melayani KB dan kesehatan reproduksi.
- g. Belum optimalnya upaya peningkatan partisipasi keluarga pra sejahtera terhadap program keluarga berencana.
- h. Jumlah keluarga dalam katagori prasejahtera dan sejahtera-1 masih tinggi



- i. Masih kurangnya kesadaran keluarga dan masyarakat dalam membina tumbuh kembang anak.
- j. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penciptaan keluarga sejahtera dan kesadaran akan arti penting penguatan keluarga sebagai basis ketahanan sosial masyarakat

1.4 Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Jambi memiliki sumber daya manusia Pada Tahun 2025 terdapat 66 Pegawai yang terdiri dari 25 Orang PNS, 43 Orang PPPK. Sedangkan bila dilihat berdasarkan jenis kelaminnya sebagian besar merupakan pegawai laki-laki yaitu sebanyak 39,39 % (26 orang) dan sisanya sebanyak 60,60 % merupakan pegawai perempuan (40 orang).

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH	PENDIDIKAN
1	SEKRETARIS	1	PASCA SARJANA
2	KABID. ADVOKASI PENGGERAKAN & INFORMASI	1	PASCA SARJANA
3	KABID PENGENDALIAN PENDUDUK	1	PASCA SARJANA
4	KABID PEMBINAAN KB	1	SARJANA
5	KABID PEMBERDAYAAN & PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	1	SARJANA
6	KASUBBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN	1	PASCA SARJANA
7	KASUBBAG KEUANGAN & ASET	1	SARJANA
8	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	1	SARJANA
9	ANALIS ASET DAERAH	1	SARJANA
10	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	1	SARJANA
11	STAFF PELAKSANA	1	PASCA SARJANA
12	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	1	SLTA UMUM
13	OPERATOR KOMPUTER	1	DIPLOMA III
14	PENATA LAPORAN KEUANGAN	1	SARJANA



15	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	1	SARJANA
16	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	1	SLTA UMUM
17	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	1	DIPLOMA IV
18	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	17	SARJANA
19	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	1	PASCA SARJANA
20	PENGADMINISTRASI UMUM	1	SLTA UMUM
21	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	11	SLTA UMUM
22	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	3	SD
23	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA	2	PASCA SARJANA
24	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA	4	SARJANA
25	PERENCANA AHLI MUDA	1	SARJANA
26	PERENCANA AHLI PERTAMA	1	SARJANA
27	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	5	SARJANA
28	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	1	SARJANA
29	PERAWAT PENYELIA	1	DIPLOMA III
30	BIDAN TERAMPIL	1	DIPLOMA III
JUMLAH		66	

1.5 Keadaan Sarana Prasarana

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Jambi memiliki sarana dan prasarana pendukung sebagaimana terinci pada tabel berikut:



Tabel 1.2
Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per 31 Desember 2025

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
1	2	3
1	Alat Bantu lainnya	-
2	- Trolley Instrumen	1
3	- Trolley Instrumen	1
4	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	
5	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR, Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, MINIBUS	1
6	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR, Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, MINIBUS	1
7	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR, Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, MINIBUS	1
8	Kendaraan Roda 4	12
9	Pengadaan Kendaraan Antar Jemput Akseptor KB (Truk Chasis Type NHR 55 c/0) VIN 2016	1
10	Kendaraan Distribusi Alokon (Isuzu Pick Up LC VIN 2017)	1
11	Kendaraan Distribusi Alokon (Karoseri Pick Up LC VIN 2017)	1
12	Kendaraan Roda empat(BH 277 AZ)	1
13	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	
14	Mobil Pick Up	1
15	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	
16	Kendaraan Roda 2	75
17	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	1
18	ALAT BENGKEL BERMESIN, Perkakas Bengkel Service, MESIN DIESEL	1
13	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	
14	Mobil Pick Up	1



15	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	
16	Kendaraan Roda 2	75
17	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	1
18	ALAT BENGKEL BERMESIN, Perkakas Bengkel Service, MESIN DIESEL	1
19	ALAT PERTANIAN	
21	Mesin Hitung/Jumlah	
22	Mesin Absen Kantor	1
23	Mesin Absen	1
24	Alat Penyimpanan Pelengkapan Kantor	
25	ALAT KANTOR, Alat Penyimpanan Perlengkapan KTR, BAND KAS/BRANKAS	1
26	Filling Cabinet	18
27	Almari Arsip	12
28	Brangkas	2
29	Alat Kantor Lainnya	
30	wireless	18
31	Genset	1
32	- Kamera Pengawas (CCTV)	1
33	- Neon Box Klinik Angso Duo	1
34	- Mesin Absensi Biometrik	1
35	- Projector	7
36	MEBEL	
37	Meja Kerja/ meja 1 biro	27
38	Papan Merek P2TP2A	1
39	Meja Rapat	8
40	Kursi Tamu	117
41	Almari Arsip Gantung	4
42	Meja Rapat Kerja	15
43	Papan Merk Kantor	137
44	Kursi putar sandaran tinggi	13
45	Podium	1
46	Pemadam Kebakaran	2



47	Rak Buku	13
48	Pengadaan Awning	2
49	Meja Kerja 1/2 Biro	7
50	Pemasangan Teralis Balai dan Gedung Klinik	1
51	- Kursi Tunggu Stenless	2
52	- Tangga	1
53	- Umbul - Umbul	1
54	- Lemari Kaca	3
55	- Teralis	1
56	- Bak Penampung Air	2
57	Pengaman Gedung Kantor (teralis,Pagar dan pintu)	1
58	Kursi Kerja	28
59	Meja Resepsionis	1
60	Rak buku arsip	1
61	Mesin Penghancur Kertas	1
62	-Meja Kerja 1 Biro	11
63	-Lemari Tinggi Pintu Kaca	11
64	-Lemari Arsif Rendah	11
65	-Mobile Drawer 2 Laci 1 File	11
66	-Kursi Tunggu Besi 4 Dududkan	13
67	-Sofa Tamu	11
68	-Meja Tamu	11
69	-Meja Kerja Komputer	11
70	ALAT PEMBERSIH	
71	pemotong rumput	1
72	ALAT PENDINGIN	
73	AC Split	27
74	- Kipas Angin	2
75	ALAT DAPUR	
76	Vacum Cleaner	1
77	Mixer	1
78	- Kulkas	1



79	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	
80	Lampu Sorot	1
81	Hordeng	2
82	Kursi Kerja Pejabat	6

1.6 Keuangan

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2025, Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Jambi didukung Anggaran Belanja Daerah. Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.523.475.000,- Anggaran yang disediakan ini diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Jambi tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan serta anggaran. Bila terjadi perubahan pada indikator kinerja atau pun target saat tahun berjalan maka harus dijelaskan secara rinci sebab penyebab terjadi perubahan atau pergeseran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.



BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Jambi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2024-2026. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Jambi merupakan komitmen Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Jambi yang tertuang dalam RPJMD tahun 2025-2029. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Jambi Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang merupakan perencanaan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Jambi Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Keputusan Walikota Jambi Nomor 380 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Jambi tahun 2025 - 2029

2.1.1 Visi Dan Misi Kepala Daerah

RPJMD tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026. Adapun Visi yang tercantum dalam RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

“MEWUJUDKAN KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERSIH, AMAN, HARMONIS, AGAMIS, INOVATIF DAN SEJAHTERA”

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kota Jambi :

1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia;
2. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
4. Penguatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan serta Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan; dan
5. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan.



Berangkat dari visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tahun 2025 – 2029 tersebut diatas maka sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membantu Walikota Jambi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Jambi mendukung misi “Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia”.

2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah

2.1.2.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu Dokumen perencanaan. Mengacu kepada visi dan misi Pemerintah daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah yang hendak dicapai atau dihasilkan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Jambi dari Tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas

2.1.2.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran perangkat daerah merupakan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Jambi yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran terhadap keberhasilan pencapaian visi dan misi Wali Kota Jambi. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program dan kegiatan pada setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sasaran Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kota Jambi Tahun 2025– 2029

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA/ RUMUS CARA PEGUKURAN INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN				
			2025	2026	2027	2028	2029
Mengendalikan Angka Kelahiran Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	$R = \frac{1}{t} \ln \left(\frac{P_t}{P_o} \right) \times 100$	1,13	1,21	1,20	1,19	1,18



2.1.2.3 Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran, Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Jambi pada tahun 2025 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sasaran, Program dan Kegiatan

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
Mengendalikan Angka Kelahiran Penduduk	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah



		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pengadaan Mebel
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota



		Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
		Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
		Pengendalian Program KKBPK
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
		Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal
		Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)



		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)



		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
		Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025



Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Jambi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
Mengendalikan Angka Kelahiran Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1.13

BERIKAN PENJELASAN KONSEPTUAL HUBUNGAN ANTARA SASARAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate)	Persen	2,02
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Persen	7,3
	Indeks pembangunan Berwawasan kependudukan (IPBK)	Persen	80,7
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Proporsi Kebutuhan KB Terpenuhi	Persen	93,5
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persen	46,8

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Jambi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 12.523.475.000,- dengan rincian Belanja Operasional sebesar Rp. 12.178.152.210,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 345.322.790,-. Sedangkan anggaran Perubahan menjadi Rp. 12.523.475.000 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 12.178.152.210 dan belanja modal sebesar Rp. 345.322.790



Tabel 2.5
Target Belanja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Jambi APBD
Perubahan Tahun 2025

URAIAN	TARGET	PERSENTASE
Belanja Operasional	12.178.152.210	97,24
Belanja Modal	345.322.790	2,76
Jumlah	12.523.475.000	100

2.3.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran

Berdasarkan DPA Perubahan Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Anggaran Belanja per Sasaran Strategis

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	PERSENTASE
	Mengendalikan Angka Kelahiran Penduduk	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	6.369.484.109	50,86
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	132.544.351	1,06
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.876.616.048	30,95
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.144.830.492	17,13

*PERSENTASE DIDAPATKAN DARI TOTAL DPA

Alokasi anggaran digunakan untuk membiayai empat program yang terdiri dari lima belas kegiatan yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Jambi sebagaimana Tabel 2.7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja berikut.



DINAS PPKB KOTA JAMBI

	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD			Mengumpulkan Data BMD sebagai bahan laporan BMD	58.402.090	Sekretariat								
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Dokumen		133.968.536	Sekretariat								
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Pengadaan Pakaian Dinas	93.750.000	Sekretariat								
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Penaglaban Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	2 Dokumen	3 Dokumen			Pendataan dan pengolahan kepegawaian			Mengumpulkan Data ASN, PPPK dan TKK	23.718.536	Sekretariat								
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Menyusun rencana BIMTEK sebagai bahan pengembangan kompetensi Pegawai	16.500.000	Sekretariat								
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi	1 Tahun		207.072.685	Sekretariat								
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket	1 Paket			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Mendata kebutuhan Alat Listrik serta membuat Bon kebutuhan Alat listrik serta membuat perjanjian kerjasama dengan pihak Toko sebagai bahan pembuatan Dokumen SPJ	3.179.178	Sekretariat								
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				77.400.000	Sekretariat								
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Penyediaan bahan logistik kantor			Mendata kebutuhan bahan logistik kantor serta membuat perjanjian kerjasama dengan pihak Toko sebagai bahan pembuatan Dokumen SPJ	9.666.552	Sekretariat								
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Mendata kebutuhan cetak dan penggandaan serta membuat perjanjian kerjasama dengan pihak Toko sebagai bahan pembuatan Dokumen SPJ	3.933.840	Sekretariat								
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			Mendata Undangan yang masuk dan Nota Dinas yang diajukan dan membuat rencana SPT dan SPPD serta membuat dan mengumpulkan Laporan Perjalanan Dinas	111.250.000	Sekretariat								
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.643.115	Sekretariat								



DINAS PPKB KOTA JAMBI

						Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terperuhnya Pengadaan Sarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit		267.922.790	Sekretariat								
					1 Unit	Pengadaan Mebel				77.199.598	Sekretariat								
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.723.103	Sekretariat								
						Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Terperuhnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		246.330.223	Sekretariat								
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				182.640.000	Sekretariat								
	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor				63.690.223	Sekretariat								
						Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Terperuhnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Peralatan Kantor	100%		559.050.000	Sekretariat								
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	69 Kendaraan	69 Kendaraan	69 Kendaraan	69 Kendaraan		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan				531.600.000	Sekretariat								
	5 Unit		10 Unit			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				27.250.000	Sekretariat								
						PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK													
						Cakupan Penyediaan Informasi Data Mihu Pengendalian Kependudukan				132.544.351	Bidang Pengendalian Penduduk								
						Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	90%		104.736.191	Bidang Pengendalian Penduduk								
Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas	3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan			Advokasi, sosialisasi, dan fasilitas pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTs, jalur nonformal dan informal				27.065.658	Bidang Pengendalian Penduduk								
Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Pencapaian Rencana	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		Pelaksanaan rapat pendendalian program KBPK				79.772.533	Bidang Pengendalian Penduduk								
						Pemetaan perkiraan pendendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota	Persentase Pemetaan Perkiraan yang berkaitan dengan rancangan Pengendalian Penduduk	90%		27.606.100	Bidang Pengendalian Penduduk								
Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		Penyediaan data dan informasi keluarga				27.606.100	Bidang Pengendalian Penduduk								
						PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)													
						Cakupan Advokasi KIE dan Penggerakan Uji Lapangan dan Basis Asesor KB				3.876.616.048	Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi								
						Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Persentase Terwujudnya Pemahaman dan Komitmen Stakeholder Tentang KB	100%		2.681.596.165	Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi								
Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Rekomendasi Informasi dan Promosi dan KIE Program Rangka Keluarga	15 Organisasi	10 Organisasi	25 Organisasi			Advokasi program KBPK kepada stakeholders dan mitra kerja				903.346.165	Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi								
Jumlah Kegiatan Promosi dan KIE Program Rangka Keluarga	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen			Komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) program KBPK sesuai kearifan budaya lokal				271.030.000	Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi								
Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Berbasis Rencana (Pembangunan) Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan			Promosi dan KIE program KBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang				110.011.000	Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi								
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Pengendalian Berbasis Rencana KBPK	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				198.000.000	Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi								
	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			Pengetahuan operasional dan sarana di balai penyuluhan KBPK				1.039.200.000	Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi								
						Pengendalian Program KBPK				160.000.000	Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi								
						Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota	Mengendalikan Jumlah Kelahiran Penduduk	80%		592.664.883	Bidang Keluarga Berencana								
Jumlah Laporan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi yang mengikuti ketersediaan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan			Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi serta layanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk karnia dan jernihanmas				90.516.000	Bidang Keluarga Berencana								
Jumlah Laporan Dukungan Operasional Kabupaten/Kota	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	3 Laporan		Peningkatan kesetaraan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)				821.114.000	Bidang Keluarga Berencana								
						Dukungan operasional pelayanan KB bergerak				81.034.883	Bidang Keluarga Berencana								
						Pembudayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah	Mengendalikan Jumlah Kelahiran Penduduk	80%		202.353.000	Bidang Keluarga Berencana								
Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan	12 Kampung KB	12 Kampung KB	12 Kampung KB			Pelaksanaan dan pengelolaan program KBPK di kampung KB				202.353.000	Bidang Keluarga Berencana								



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Jambi sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Jambi kedepan.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Jambi. Dari hasil pengukuran selanjutnya dilakukan Penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

Tabel 3.1
Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja

NO	KATEGORI	RATA-RATA% CAPAIAN
1	Sangat Baik	≥ 90
2	Baik	75,00 – 89,9
3	Cukup	65,00 – 74,99
4	Kurang	50,00-64,99
5	Sangat Kurang	0-50,00

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerjanya semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$



3.1.1 Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Capaian Indikator Kinerja Dinas Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2025 dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA/ RUMUS CARA PEGUKURAN INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Mengendalikan Angka Kelahiran Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	$R = \frac{1}{t} \ln \left(\frac{Pt}{Po} \right) \times 100$	1,13	1,22	92,03

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2025, indikator Laju Pertumbuhan Penduduk memiliki realisasi sebesar 1,22 dengan capaian 92,03 % dari target sebesar 1,13 % Sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Baik. Berdasarkan tabel 3.2 diatas diperoleh dari capaian kinerja masing-masing program yang dapat dijelaskan dalam tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3

Pengukuran Kinerja Program Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA CARA PEGUKURAN INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Pengendalian Penduduk	Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate) TFR	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100$	2,06	2,08	98,03
	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	$(D1 \times D2 \times D3 \times D4 \times D5) \times (\frac{1}{4})$	67	67,6	100,8
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$\frac{\text{Angka Kelahiran Wanita Usia Subur WUS (15-49)}}{\text{WUS (15-49)}} \times 100$	9,10	7,8	114,28
Pembinaan Keluarga Berencana	Proporsi Kebutuhan KB terpenuhi	$\frac{\text{Pemakaian alat KB saat ini moderen}}{\text{Kebutuhan ber KB yang belum terpenuhi + Pemakaian KB saat ini}}$	92	92,40	100,43
Program Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan	$\frac{\text{Poktan yang mengikuti pembinaan}}{\text{Seluruh jumlah poktan}} \times 100$	44,17	44,20	100,06



	Ketahanan Keluarga				
--	-----------------------	--	--	--	--

1. ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut usianya. Angka kelahiran menurut usia/Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun adalah banyaknya kelahiran per 1.000 perempuan pada kelompok usia 15 -19 tahun. Pada tahun 2024 capaian angka kelahiran usia 15-19 tahun Kota Jambi sebesar 7,8 yang artinya ada 7 atau 8 kelahiran per 1.000 wanita pada kelompok usia 15-19 tahun. Angka tersebut tercapai karena didukung dengan meningkatnya sosialisasi tentang Pernyiapan Kehidupan Bagi Remaja (PKBR) di sekolah-sekolah dan masyarakat melalui kegiatan ekstra kelompok kegiatan PIK R dan kegiatan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) jalur formal tingkat SLTP/MTS dan SD/MIN sehingga remaja terhindar dari pernikahan dini dan seks bebas.
2. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan adalah indeks komposit yang merepresentasikan lima dimensi pembangunan berwawasan Kependudukan, meliputi dimensi partisipasi, dimensi keberlangsungan/keberlanjutan, dimensi pemihakan, dimensi integrasi dan dimensi kesetaraan. Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan telah tercapai yaitu sangat baik
3. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) memiliki realisasi sebesar 7,80 dengan capaian 114,28 dari target sebesar 9,10 Sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Baik. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun. memiliki realisasi sebesar 2,08 dengan capaian 98,03 dari target sebesar 2,04 Sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator initermasuk dalam kategori Baik. karena didukung dengan meningkatnya sosialisasi tentang Pernyiapan Kehidupan Bagi Remaja (PKBR) di sekolah-sekolah dan masyarakat melalui kegiatan ekstra kelompok kegiatan PIK R dan kegiatan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) jalur formal tingkat SLTP/MTS dan SD/MIN sehingga remaja terhindar dari pernikahan dini dan seks bebas.
4. Proporsi Kebutuhan KB terpenuhi adalah ukuran seberapa baik program Keluarga Berencana (KB) dapat memenuhi keinginan pasangan usia subur (PUS) untuk menunda, membatasi kelahiran, atau tidak memiliki anak lagi dengan menggunakan kontrasepsi, dari



Tabel diatas di Tahun 2024 untuk Target 92 terealisasi 92,40 sehingga capainnya 100,43, Sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Baik, hal ini tercapai di karenakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi melakukan pelayanan di Klinik Pratama KB Angso Duo milik Dinas PPKB Kota Jambi secara gratis dan efektif serta efisien karena para aseptor tidak bergabung dengan penyakit lain (khusus pelayanan KB) selain itu Dinas PPKB Kota Jambi tidak hanya diam di klinik saja tetapi turun ke 11 Kecamatan di Kota Jambi menggunakan Mobil Unit Pelayanan untuk melakukan pelyanan KB secara gratis

5. Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga merupakan program yang diukur melalui indikator persentase keluarga yang aktif dalam kegiatan seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA),

3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dilakukan melalui analisis pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan kinerja Realisasi dengan target yang direncanakan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan 2025

INDIKATOR SASARAN	2024			2025			PERSENTASE REALISASI 2025 TERHADAP RELISASI 2024
	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	
Laju Pertumbuhan Penduduk	1,25	1,16	92,24	1,22	1,13	92,03	97,94

Berdasarkan tabel diatas, capaian realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 adalah sebesar 98,91 %. Capaian kinerja tahun 2025 lebih rendah dari tahun 2024.

Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (migrasi). Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa capaian di tahun 2024 yaitu 93,96 dan capaian di tahun



2025 sebesar 92,03 Sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Baik,

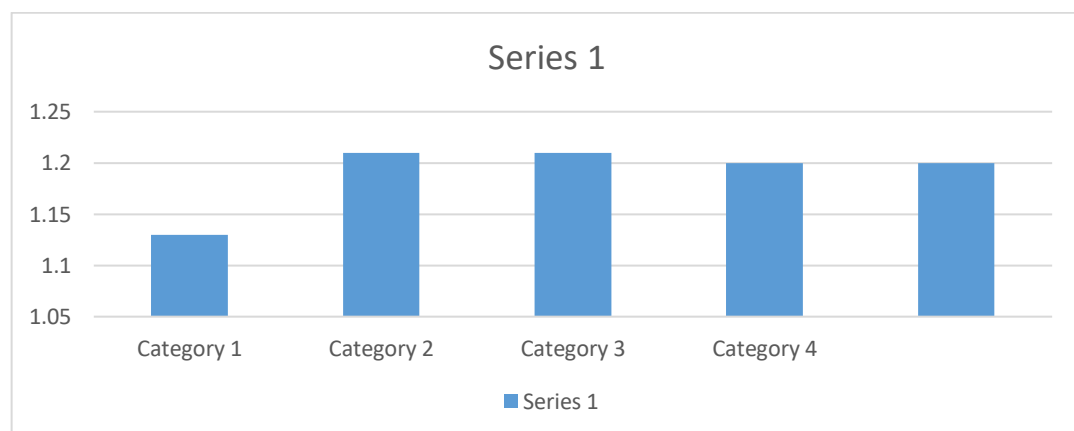
Laju pertumbuhan penduduk tidak hanya berkaitan dengan bertambahnya jumlah penduduk, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pengendalian jumlah penduduk perlu disertai dengan upaya peningkatan kualitas manusianya. Untuk itu di DPPKB Kota Jambi telah melakukan beberapa upaya yaitu berupa Pembinaan, edukasi, Informasi, Pendampingan dan pemberian Makanan Tambahan (PMT) dengan sasaran dari Ibu Hamil, Balita, Remaja, dan Lansia serta Keluarga Resiko Stunting (KRS) semuanya dilaksanakan dengan tujuan Penguatan kualitas SDM dapat tercapai sesuai dengan Misi ke 1 yaitu Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Target Renstra Tahun 2025-2029

INDIKATOR SASARAN	2025		2026		2027		2028		2029	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Laju Pertumbuhan Penduduk	1,13	1,22	1,21	-	1,21	-	1,20	-	1,20	-

Dari tabel diatas juga dapat dicermati bahwa apabila realisasi tahun 2025 tersebut disandingkan dengan target pada akhir Renstra maka telah tercapai. Berikut digambarkan perkembangan capaian kinerja dibandingkan dengan target Renstra.



Gambar 3.1 Diagram Perkembangan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Dibanding Target



Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (migrasi). Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana lebih fokus ke kelahiran (natalitas) dan kematian (mortalitas),

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan berbagai masalah seperti kepadatan penduduk, pengangguran, dan tekanan pada fasilitas umum. Oleh karena itu, pengendalian pertumbuhan penduduk penting untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dalam menentukan target Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi menggunakan Tren 3 tahun kebelakan dan berdasarkan realisasi

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional / Provinsi

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET PROVINSI	REALISASI	CAPAIAN
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,20	1,28	93,33

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan antara realisasi Indikator Sasaran tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi dengan target standar nasional/provinsi, menunjukkan adanya ketercapaian kinerja organisasi terhadap target standar nasional dengan capaian sebesar 93,33 %

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan DPPKB Kota Jambi Tahun 2025, terdapat beberapa faktor penghambat yang memengaruhi optimalisasi pencapaian kinerja, baik yang bersifat internal maupun eksternal, antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Jumlah penyuluh KB dan tenaga pendukung belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah sasaran dan luas wilayah pelayanan. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan intensitas pendampingan, sosialisasi, serta pengawalan program di tingkat kelurahan dan kecamatan.

2. Faktor Sosial dan Budaya Masyarakat

Masih terdapat persepsi negatif terhadap program Keluarga Berencana, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pengendalian penduduk, Faktor ini memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam program DPPKB.

3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung



Ketersediaan sarana operasional dan fasilitas pendukung kegiatan,

4. Dinamika Data Kependudukan

Perubahan data sasaran yang cukup dinamis, termasuk mobilitas penduduk dan migrasi, menyebabkan perlunya penyesuaian berulang dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, yang berdampak pada ketepatan sasaran program.

5. Koordinasi Lintas Sektor yang Belum Optimal

Meskipun telah dilakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait, sinergi lintas sektor dalam beberapa kegiatan masih perlu ditingkatkan agar intervensi program pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga dapat berjalan lebih terpadu dan berkelanjutan.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, DPPKB Kota Jambi Tahun 2025 telah dan terus melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Penguatan dan Optimalisasi Sumber Daya Manusia

Melakukan optimalisasi peran penyuluh KB dan kader melalui peningkatan kapasitas, pembinaan, serta pembagian wilayah kerja yang lebih efektif. Selain itu, dilakukan penguatan peran mitra dan relawan di tingkat kelurahan untuk memperluas jangkauan layanan dan pendampingan masyarakat.

2. Peningkatan Edukasi dan Pendekatan Sosial Budaya

Mengintensifkan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang disesuaikan dengan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat. Pendekatan dilakukan melalui tokoh masyarakat, tokoh agama, serta kelompok masyarakat strategis guna meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap program pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

3. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Secara Optimal

Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia serta memanfaatkan dukungan fasilitas dari perangkat daerah dan mitra kerja. Selain itu, dilakukan penjadwalan kegiatan lapangan yang lebih terencana untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program.

4. Penguatan Pengelolaan dan Pemutakhiran Data

Melakukan pemutakhiran dan validasi data sasaran secara berkala melalui koordinasi dengan instansi terkait serta pemanfaatan sistem informasi kependudukan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan kualitas perencanaan program.

5. Peningkatan Koordinasi dan Sinergi Lintas Sektor



Memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah terkait, kecamatan, kelurahan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Sinergi lintas sektor dilakukan untuk memastikan program pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga dapat berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Menyajikan informasi tentang tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Perangkat Daerah. Tingkat efisiensi merupakan perbandingan antara capaian realisasi indikator kinerja dengan capaian realisasi penyerapan anggaran atas Indikator Sasaran. Dikatakan efisien, apabila capaian realisasi indikator kinerja sama dengan dan/ atau lebih besar dari capaian realisasi anggaran. Berikut efisiensi dari sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi pada tahun 2025:

Tabel
Analisis Efisiensi

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA %	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN ATAS INDIKATOR SASARAN %	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=(5-4)
1	Mengendalikan Angka Kelahiran Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	92,03	92,22	0,19

Capaian kinerja pengendalian laju pertumbuhan penduduk menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan realisasi kinerja sebesar 92,03% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan yang direncanakan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi telah dilaksanakan secara efektif dan memberikan dampak positif terhadap pengendalian pertumbuhan penduduk.

Dari sisi pengelolaan anggaran, tingkat penyerapan anggaran mencapai 92,22%, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan dan tidak terdapat hambatan signifikan dalam realisasi anggaran. Tingginya serapan anggaran juga menunjukkan kemampuan perangkat pelaksana dalam mengoptimalkan alokasi dana untuk mendukung pencapaian tujuan program.

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja dan penyerapan anggaran, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,19. Nilai efisiensi ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja relatif seimbang dengan penggunaan anggaran, di mana tambahan



anggaran yang digunakan mampu menghasilkan peningkatan kinerja yang signifikan. Dengan tingkat efisiensi tersebut, pelaksanaan program pengendalian laju pertumbuhan penduduk dapat dikategorikan efisien, karena output yang dihasilkan sebanding dengan sumber daya yang digunakan.

Secara keseluruhan, kinerja pengendalian laju pertumbuhan penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi telah menunjukkan hasil yang optimal, baik dari aspek pencapaian target maupun pengelolaan anggaran. Ke depan, diperlukan upaya untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian kinerja melalui penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas program kependudukan, serta optimalisasi penggunaan anggaran agar efisiensi pelaksanaan program dapat terus ditingkatkan.

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Jambi Tahun 2025 secara umum menunjukkan kinerja yang baik, tercermin dari tingginya capaian indikator kinerja utama dan optimalnya penyerapan anggaran. Keberhasilan maupun keterbatasan dalam pencapaian kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat sebagaimana diuraikan berikut.

Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian kinerja DPPKB Kota Jambi Tahun 2025 didukung oleh beberapa program dan kegiatan strategis, antara lain:

Program Pengendalian Penduduk

Program ini berperan penting dalam menekan laju pertumbuhan penduduk melalui kegiatan :

- Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
- Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kota

Program Pembinaan Keluarga Berencana

Program KB menjadi faktor utama keberhasilan kinerja, terutama melalui :

- Pelayanan KB kepada pasangan usia subur
- Penyediaan alat dan obat kontrasepsi
- Peningkatan kapasitas penyuluh KB dan kader
- Advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) kependudukan
- Sosialisasi pendewasaan usia perkawinan
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian penduduk



Cakupan layanan yang luas dan mudah diakses mendorong peningkatan akseptor KB serta keberlanjutan penggunaan kontrasepsi.

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Program ini mendukung peningkatan kualitas keluarga melalui:

- Pembinaan kelompok BKB, BKR, dan BKL
- Penguatan peran keluarga dalam pengasuhan dan ketahanan keluarga

Kegiatan ini berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya keluarga berkualitas sebagai dasar pembangunan sumber daya manusia.

Keberhasilan juga ditopang oleh Dukungan Manajemen dan Tata Kelola

- Perencanaan program yang matang
- Monitoring dan evaluasi berkala
- Tingginya penyerapan anggaran yang sejalan dengan capaian kinerja

Program dan Kegiatan yang Mengalami Kendala

Di samping keberhasilan yang dicapai, masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi kinerja, antara lain:

a. Keterbatasan SDM Penyuluh dan Kader KB

Jumlah dan kapasitas SDM belum sepenuhnya sebanding dengan luas wilayah dan jumlah sasaran, sehingga intensitas pendampingan dan sosialisasi belum merata.

b. Faktor Sosial dan Budaya

Masih adanya:

- Persepsi negatif terhadap program KB
- Rendahnya partisipasi kelompok usia muda
- Praktik perkawinan usia dini di beberapa wilayah

Hal ini memerlukan pendekatan yang lebih intensif dan berkelanjutan.

c. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung

Beberapa kegiatan belum berjalan optimal akibat keterbatasan sarana dan prasarana

Secara keseluruhan, program dan kegiatan DPPKB Kota Jambi Tahun 2025 lebih banyak menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, terutama melalui program pengendalian penduduk, pelayanan KB, dan pembangunan keluarga yang dilaksanakan secara terintegrasi. Kendala yang masih dihadapi bersifat teknis dan sosial, serta dapat diminimalkan melalui peningkatan kapasitas SDM, penguatan kemitraan lintas sektor, dan inovasi pendekatan pelayanan kepada masyarakat.

Ke depan, DPPKB Kota Jambi perlu mempertahankan program-program yang telah berjalan efektif serta melakukan penyempurnaan pada kegiatan yang masih menghadapi hambatan guna meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.



3.2 Realisasi Anggaran 2025

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2025 sebesar 88,17 % dari total anggaran yang dialokasikan. Secara rinci realisasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Jambi dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Tabel
Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga
Berencana Kota Jambi Tahun 2025

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TAHUN 2025	REALISASI	%
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12.523.475.000	11.041.368.617	88,17
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12.523.475.000	11.041.368.617	88,17
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.369.484.109	5.306.129.769	83,31
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.835.131	18.757.100	78,70
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.835.131	18.757.100	78,70
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.872.902.652	3.983.513.090	81,75
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.722.554.389	3.847.350.190	81,47
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	146.918.000	133.003.600	90,53
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.430.263	3.159.300	92,10
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	58.402.090	45.856.500	78,52
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	58.402.090	45.856.500	78,52
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	133.968.536	101.038.100	75,42
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	93.750.000	77.700.000	82,88
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	23.718.536	23.338.100	98,40
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16.500.000		-



Administrasi Umum Perangkat Daerah	207.072.685	202.434.747	97,76
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.179.178	2.811.000	88,42
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.400.000	75.660.000	97,75
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.666.552	8.903.300	92,10
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.933.840	3.435.000	87,32
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.250.000	110.185.947	99,04
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.643.115	1.439.500	87,61
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	267.922.790	259.378.000	96,81
Pengadaan Mebel	77.199.598	75.000.000	97,15
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	190.723.192	184.378.000	96,67
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.330.225	205.336.611	83,36
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	182.640.000	155.440.111	85,11
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.690.225	49.896.500	78,34
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	559.050.000	489.815.621	87,62
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	531.800.000	471.919.621	88,74
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.250.000	17.896.000	65,67
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	132.544.351	130.720.050	98,62
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	104.738.191	103.015.382	98,36
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	27.965.658	27.691.233	99,02
Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	76.772.533	75.324.149	98,11
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	27.806.160	27.704.668	99,64



Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	27.806.160	27.704.668	99,64
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.876.616.048	3.640.690.906	93,91
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.681.596.165	2.575.703.629	96,05
Pengendalian Program KKBPK	160.000.000	142.785.000	89,24
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	1.039.200.000	1.019.282.181	98,08
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	198.000.000	197.750.000	99,87
Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	110.011.000	109.729.499	99,74
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	271.039.000	216.290.500	79,80
Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	903.346.165	889.866.449	98,51
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	992.664.883	867.682.277	87,41
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	90.516.000	83.760.000	92,54
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	821.114.000	706.924.500	86,09
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	81.034.883	76.997.777	95,02
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	202.355.000	197.305.000	97,50
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	202.355.000	197.305.000	97,50
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.144.830.492	1.963.827.892	91,56



Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.079.460.000	1.901.564.628	91,45
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	352.260.000	174.914.630	49,65
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	130.000.000	129.449.998	99,58
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	1.597.200.000	1.597.200.000	100,00
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	65.370.492	62.263.264	95,25
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	65.370.492	62.263.264	95,25
TOTAL	12.523.475.000	11.041.368.617	88,17

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran (setelah dikurangi belanja gaji dan tunjangan ASN) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	REALISASI	TARGET	CAPAIAN %
1	Mengendalikan Angka	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,13	1,22	92,03	7.194.018.427	7.800.920.611	92,22



Kelahiran Penduduk							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Pada table diatas dapat dijelaskan bahwasannya anggaran pada indikator sasaran telah tercapai dengan baik yaitu 92,22 % sehigga pada hasil capaian di Indikator sasaran sangat baik, hal ini karena dukungan dari Program dan Kegiatan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi antara lain :

1. Memberikan edukasi, informasi serta sosialisasi terkait pentingnya pendewasaan usia perkawinan, dan pendampingan kepada keluarga dalam melakukan pengasuhan anak melalui poktan BKB, penyiapan kehidupan berkeluarga melalui bimbingan perkawinan hingga pelayanan konseling melalui kelompok kegiatan BKR dan PIK R.
2. sosialisasi tentang Pernyiapan Kehidupan Bagi Remaja (PKBR) di sekolah-sekolah dan masyarakat melalui kegiatan ekstra kelompok kegiatan PIK R dan kegiatan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) jalur formal tingkat SLTP/MTS dan SD/MIN.
3. pembinaan keluarga melalui Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) jalur formal Tingkat SLTP/MTS dan SD/MIN, kelompokkegiatan (poktan) di masyarakat diantaranya melalui Poktan BKB, BKR, BKL, UPPKA dan PIK R, pemberdayaan masyarakat di Kampung Keluarga Berkualitas.
4. mobilisasi pergerakan lini lapangan dan penguatan KIE di kalangan masyarakat. DPPKB Kota Jambi terus berupaya untuk melaksanakan sosialisasi melalui poktan-poktan yang ada dilapangan, PPKBD dan Sub PPKBD melakukan pendekatan kefasilitas pelayanan KB (klinik-klinik KB) serta lebih memperdayakan petugas lapangan KB (PKB) menemui akseptor.



BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas PPKB Kota Jambi Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas PPKB Kota Jambi Tahun 2025. Penyusunan LKJ ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJ Dinas PPKB Kota Jambi Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas PPKB Kota Jambi dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

4.2 RENCANA TINDAKLANJUT

1. Setiap Bidang, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam pencapaian indikator kinerja dengan sebaik-baiknya;
2. menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kota Jambi untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan secara tahun jamak (*multy year*);
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2025, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2025 ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jambi,
4. Prinsip perencanaan kegiatan mengacu kepada prinsip perencanaan yang cerdas (*SMART Planning*), yaitu kegiatan terpilih harus diyakini argumentatif dan memiliki kekhususan (*Specific*), terukur (*Measurable*), ketercapaian (*Achievable*), ketersediaan sumber daya (*Resources Availability*), dan waktu (*Time*). Pemilihan kegiatan melalui arah fokus pembangunan yang merujuk pada rencana capaian kinerja berdasarkan bidang pada setiap misi pembangunan, merupakan tujuan



bersama yang pencapaiannya membutuhkan sinergitas lintas OPD, antar tingkatan pemerintahan dan dunia usaha maupun masyarakat, terdiri atas : peningkatan kualitas pendidikan; peningkatan kualitas kesehatan; peningkatan daya beli masyarakat; kemandirian pangan; peningkatan kinerja aparatur; pengembangan infrastruktur wilayah; kemandirian energi dan kecukupan air baku; penanganan pengelolaan bencana; dan pembangunan perdesaan.

5. Prinsip administrasi perencanaan, yaitu menggunakan *Shewhart Cycle* yang dikenal dengan siklus PDCA dengan tahapan : Rencanakan (*Plan*), Kerjakan apa yang telah direncanakan (*Do*), Periksa atau monitor pelaksanaan (*Check*), dan Aksi tindak lanjut (*Action*). Untuk memudahkan RPJM Daerah Kota Jambi Tahun 2013-2018 koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan, maka digunakan pembagian peran
6. Prinsip pelaksanaan program dan kegiatan menggunakan prinsip akuntabilitas (*accountability*) yang memiliki 3 (tiga) aspek, yaitu:
 - a. Taat dan sesuai aturan (*Compliance with Regulation*);
 - b. Sesuai dengan norma profesionalisme (*Adherence with Norm Professionalism*);
 - c. *Professionalism*);
7. Prinsip dukungan kebijakan keuangan mengikuti kebutuhan program terpilih (*Money Follow Program Selected Policy*);
8. Prinsip pengendalian untuk sukses pelaksanaan kegiatan dengan memerankan :
 - a. Desk monitoring dan evaluasi implementasi program untuk pengendalian kualitas implementasi kegiatan dan ketaatan waktu serta output;
 - b. Desk akuntabilitas untuk pendampingan dan pengendalian ketaatan terhadap aturan dan disiplin anggaran.

Lampiran - Lampiran

1. Perjanjian Kinerja
2. Dokumentasi Inovasi dan Prestasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi



DOKUMENTASI INOVASI DAN PRESTASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA JAMBI







PELAYANAN KB DI KLINIK ANGSO DUO DPPKB KOTA JAMBI

